

## Makan Bergizi Gratis (MBG) Program in the Perspective of Social Justice and Socio - Political Dynamics

### Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial - Politik

Anifatul Kiftiyah<sup>1</sup>, Firda Ayu Palestina<sup>2</sup>, Faris Ulul Abshar<sup>3</sup>, Khofidotur Rofiah<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Agency For Fostering Pancasila Ideology, Indonesia. E-mail: [anifatul.kiftiyah@bpip.go.id](mailto:anifatul.kiftiyah@bpip.go.id)

<sup>2</sup>Veterans National Development University, Indonesia. E-mail: [firdaus.avu.palestina.lh@upnjatim.ac.id](mailto:firdaus.avu.palestina.lh@upnjatim.ac.id)

<sup>3</sup>University of Jember, Indonesia. E-mail: [farizua4879@gmail.com](mailto:farizua4879@gmail.com)

<sup>4</sup>Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Poland. E-mail:

[khofidotur.rofiah@doktorant.up.krakow.pl](mailto:khofidotur.rofiah@doktorant.up.krakow.pl)

---

**Abstract:** *Makan Bergizi Gratis (MBG) is a flagship program of the Prabowo Subianto-Gibran administration. One of the program's objectives is to improve the welfare of society, particularly students. However, the implementation of the MBG program has raised many criticisms and questions. This study will examine whether the program is on target, thereby providing equitable welfare and social justice in line with the implementation of the fifth principle of Pancasila, as well as the implementation of the MBG program from a socio-political dynamics perspective. The purpose of this study is to examine the dynamics of the MBG program's implementation from the perspective of social justice and socio-political dynamics. This study is expected to contribute to providing input for the implementation of the MBG program from the perspective of "Social Justice" and socio-political dynamics in society. This research is a library research study using a Systematic Literature Review (SLR) approach. The data sources for this study include journals, mass media, and other supporting literature. The analysis technique used in this study is argumentative, focusing on societal events related to the implementation of the MBG. The results of this study are: 1) the government needs to prioritize and give precedence to schools in underdeveloped, frontier, and outermost (3T) regions, such as Nias, Mentawai, Musi Rawas Utara, and other 3T regions, in receiving the MBG, 2) The sustainability of the MBG program depends on several factors, namely: budgetary factors, policy stability, and government commitment.*

**Keyword:** *Free Nutritious Meal (MBG); Social Justice; 3T Regions.*

**Abstrak:** Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran. Salah satu tujuan MBG adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pelajar. Lebih lanjut pelaksanaan program MBG masih banyak menuai kritik dan pertanyaan. Penelitian ini akan membahas apakah program ini sudah tepat sasaran, sehingga dapat memberikan kesejahteraan dan keadilan sosial yang merata sesuai dengan implementasi sila ke lima, serta pelaksanaan program MBG ditinjau dari aspek dinamika sosial-politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana dinamika pelaksanaan MBG ditinjau dalam perspektif keadilan sosial dan dinamika sosial - politik. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk memberikan masukan pelaksanaan program MBG dalam perspektif keadilan sosial dan dinamika sosial - politik di masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Sumber data penelitian ini berupa jurnal, media massa, dan literatur penunjang lainnya. Selain itu teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah argumentatif dengan berfokus pada kejadian di masyarakat yang berhubungan dengan pelaksanaan MBG. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) pemerintah perlu mengutamakan dan memprioritaskan sekolah-sekolah yang berada di daerah 3T (tertinggal, terdepan, tertular) seperti Nias, Mentawai, Musi Rawas Utara dan daerah 3T lainnya dalam penerimaan MBG, 2) keberlanjutan program MBG bergantung pada beberapa faktor yaitu: faktor anggaran, stabilitas kebijakan dan komitmen pemerintah.

**Kata Kunci:** Makan Bergizi Gratis (MBG); Keadilan Sosial; Daerah 3T.

## 1. Pendahuluan

Program Makan Gratis muncul pada bulan Juli 2006. Saat itu Prabowo membicarakan permasalahan stunting dan mendapatkan data-data yang sangat mengejutkan, bahwasannya terdapat 30% anak-anak di Indonesia yang berumur di bawah 5 tahun telah mengalami stunting karena kekurangan gizi (Hidayatullah, 2024). Sebagaimana angka stunting di Indonesia pada tahun 2024 sebesar 14% (Tarmizi, 2024). Berawal dari kegelisahan tersebut maka saat Prabowo menjabat sebagai Presiden RI berusaha untuk mewujudkan ide makan gratis yang akan diberikan kepada para siswa di seluruh Indonesia. Selanjutnya ide makan gratis tersebut disebut dengan Makan Bergizi Gratis (MBG).

MBG merupakan salah satu program unggulan yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo - Gibran yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan kekurangan gizi dan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Sasaran utama program MBG adalah anak-anak, pelajar dan ibu hamil. Hal tersebut berdasarkan pada data dari Kementerian Kesehatan dan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang menunjukkan 41% siswa mengalami kelaparan yang berdampak pada menurunnya kualitas pendidikan (Merlinda & Yusuf, 2025). Tantangan utama dalam pelaksanaan Program MBG ialah besarnya alokasi anggaran yang dibutuhkan. Pengalokasian anggaran dalam pelaksanaan program MBG harus dilakukan dengan cermat dan tepat agar tidak mengganggu stabilitas keuangan negara dan mengorbankan program strategis lainnya. Setidaknya program MBG harus mempunyai dampak secara langsung kepada rakyat Indonesia, karena pada dasarnya rakyat merupakan subjek dalam kebijakan tersebut. Lebih lanjut, seberapa jauh kebijakan program MBG dapat mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tertuang dalam sila ke lima Pancasila bahwa “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Visi keadilan sosial menurut Pancasila adalah keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan Rohani. Keseimbangan antara peran manusia sebagai mahluk individu maupun mahluk sosial. Meliputi juga keseimbangan antara pemenuhan hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan demikian, visi keadilan sosial pada sila kelima Pancasila harus memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia (Asmaroini, 2017). Melalui sistem yang humanis diharapkan program MBG dapat mewujudkan visi keadilan dalam sila kelima Pancasila.

Program MBG yang dicanangkan oleh pemerintah merupakan program yang mempunyai tujuan mulia, hal tersebut sejalan dengan semangat sila ke lima Pancasila, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Pemerintah berusaha untuk memenuhi kebutuhan gizi secara merata kepada seluruh siswa mulai dari daerah-daerah terpencil seperti daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan, tertular) hingga ke kota-kota besar tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi. Setiap siswa mempunyai hak yang sama untuk dapat menikmati makanan bergizi. Langkah pemerintah tersebut mencerminkan keadilan sosial yang merata karena semua siswa diperlakukan sama dan setara untuk mendapatkan kesejahteraan bersama.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang MBG antara lain: Maharani dkk (Maharni, Namira, & Chairunnisa, 2024) menuliskan dalam jurnalnya bahwa program MBG merupakan langkah yang sangat progresif yang dapat menumbuhkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat secara menyeluruh. Salah satu dampak sosial yang dihasilkan adalah menurunnya tingkat kelaparan, khususnya bagi para pelajar dan balita. Program MBG dapat memberikan asupan nutrisi kepada anak-anak yang berakibat kepada meningkatnya kesehatan dan kinerja akademis mereka. Program ini adalah salah satu langkah proaktif dalam mengatasi kelaparan khususnya di kalangan pelajar dan kelompok rentan.

Sementara itu Fauzi (Fauzi, 2024) dalam tulisannya menyampaikan bahwa program MBG merupakan langkah untuk menuju sistem pendidikan modern, dan difusi inovasi. Akan tetapi ada beberapa kritik untuk program MBG ini, antara lain tentang kesiapan infrastruktur, prioritas dan ketergantungan kepada negara. Selain itu kesesuaian budaya dan adopsi juga diangkat dalam mengadaptasi praktik tersebut ke Indonesia. Keberhasilan di negara Indonesia sangat bergantung pada kemampuan dalam mengadaptasi program MBG sesuai dengan kondisi masyarakat, pengimplementasian MBG, dan cara pendistribusian MBG.

Andin dkk berpendapat bahwa MBG diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial dengan memberikan makanan bergizi gratis kepada siswa yang kurang mampu. Dengan demikian maka kebutuhan gizi siswa dapat terpenuhi dan para siswa lebih berpotensi memperbaiki kemampuan belajar dan dapat meningkatkan kesehatan siswa. Selain itu program MBG dapat menghidupkan nilai keadilan sosial di masyarakat karena setiap masyarakat mendapatkan porsi yang setara (Andin, et al., 2025).

Berdasarkan pada uraian di atas dan beberapa penelitian tentang MBG, maka penulis akan berfokus pada dua rumusan masalah yaitu: 1). apakah program MBG sudah tepat sasaran sehingga dapat memberikan kesejahteraan sebagaimana visi keadilan sosial dalam sila ke lima Pancasila? Bagaimana jika pelaksanaan program MBG ditinjau dari aspek dinamika sosial - politik di Indonesia? Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai masukan dalam pelaksanaan program MBG, sehingga pelaksanaan program MBG tepat sasaran dan dapat mewujudkan visi keadilan sila kelima Pancasila.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). SLR adalah cara untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensistesisikan penelitian yang relevan dengan pertanyaan penelitian, fokus penelitian, maupun fenomena yang diteliti (van Dinter et al., 2021). Tujuan utama pendekatan SLR adalah untuk meningkatkan transparansi dan sintesis temuan pada tahap proses pencarian sumber data, sehingga data dapat diolah secara sistematis (Lame, 2019), (Triandini & dkk, 2019). Sumber data penelitian ini berupa jurnal bereputasi yang terindeks sinta maupun scopus. Media masa juga dijadikan sebagai sumber pendukung dalam melihat bagaimana realisasi pelaksanaan program MBG. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Sumber data dikaji,

diidentifikasi, dan dievaluasi, kemudian dideskripsikan berdasarkan temuan atas realisasi pelaksanaan program MBG. Dengan demikian, penulis menyampaikan Kesimpulan berdasarkan pada sumber data yang telah dielaborasi.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Perspektif Keadilan Sosial

Pada kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024 - 2029, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming menjanjikan pelaksanaan program makan siang gratis sebagai salah satu program unggulan yang bertujuan untuk mengurangi angka stunting di Indonesia. Dengan penuh komitmen, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming menyatakan bahwa program tersebut bukanlah janji semata dan akan direalisasikan jika keduanya terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden dan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden pada periode 2024-2029, program tersebut mulai dilaksanakan tepatnya pada 6 Januari 2025. Program ini menekankan kesadaran atas pentingnya akses pemerataan kesejahteraan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Konsep kesejahteraan negara menekankan pada peran besar negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Negara mempunyai tanggungjawab untuk memberikan kemudahan akses pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial lainnya. Selain itu negara juga hadir dalam menyediakan program-program kesejahteraan, memastikan berjalannya keadilan sosial dan bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. (Pattipeilohy & Saingo, 2023).

Pancasila merupakan dasar negara yang tidak hanya dijadikan sebagai prinsip dalam bernegara, akan tetapi dipandang sebagai suatu pedoman dalam mensejahterakan masyarakat karena mempunyai implementasi dan implikasi yang luas bagi masyarakat. Para pemangku kebijakan wajib berpedoman kepada Pancasila dalam menentukan kebijakan-kebijakan publik. Dinamika lahirnya suatu kebijakan dapat dilihat mulai dari lahirnya Indonesia hingga saat ini. Adanya persoalan-persoalan yang sangat kompleks dalam beragama sehingga menuntut untuk dibentuknya kebijakan sebagai salah satu cara menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa melahirkan permasalahan yang baru (Kiftiyah & Sutrisno, 2023), sehingga hadirnya Pancasila merupakan kontribusi untuk menciptakan masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Konsep tersebut menekankan bahwa kesejahteraan merupakan aspek yang sangat luas tidak hanya aspek sosial akan tetapi juga mencakup aspek moral dan spiritual. Dengan demikian pemerintah berusaha mengurangi kesenjangan sosial ekonomi melalui program-program dan kebijakan yang dibentuknya (Sari & Najicha, 2022).

Teori keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat berhubungan dengan pemerataan keadilan. Sebagai negara yang berkeadilan sosial maka negara hadir untuk melindungi warga negara dan memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan

bangsa (Yuanitasari & Suparto, 2020). Jika merujuk pada 45 butir Pengamalan Pancasila yang sesuai dengan TAP MPR No. 1 / MPR / 2003, program MBG sesuai dengan butir ke 11 Pengamalan sila ke 5, yaitu : Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial (Kemhan, 2014 ). Diharapkan hadirnya program MBG ini dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan sehingga dapat mengembangkan sikap adil terhadap sesama masyarakat.

Berdasarkan pada konsep kesejahteraan tersebut, maka secara jelas bahwa MBG merupakan program pemerintah yang sangat baik dalam membantu masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu. Akan tetapi realisasi dalam program MBG tidaklah mudah. Diperlukan perencanaan yang matang sehingga program tersebut dapat tepat sasaran. Selain itu perlu dipastikan lagi bahwasannya program tersebut tidak hanya berfokus pada sekadar memberi makan semata akan tetapi harus melihat dampak secara keseluruhan dan jangka panjang.

CISDI (*Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives*) dalam penelitiannya menuliskan bahwa program MBG belum memprioritaskan daerah-daerah tertinggal dengan kasus kekurangan gizi yang lebih tinggi. Saat ini persebaran penanganan kasus stunting masih belum merata karena terdapat daerah-daerah yang mempunyai angka kekurangan gizi lebih tinggi (Cisdi, 2024). Akan tetapi belum jelas apakah program MBG akan dijalankan di seluruh kabupaten/ kota atau memprioritaskan daerah tertinggal guna menurunkan stunting sebagaimana dalam Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Besarnya anggaran pelaksanaan program MBG menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Selain itu, sasaran program MBG tidak dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat; masyarakat hanya mengetahui berjalannya program MBG melalui kanal media sosial. Hal tersebut karena tidak tersedia mekanisme partisipasi publik secara transparan yang dapat diakses dan berjalan berkelanjutan untuk memantau perkembangan pelaksanaan program MBG. Fakta tersebut memunculkan kekhawatiran publik terhadap kualitas perencanaan, keterbatasan ruang fiskal sampai pada kekhawatiran tentang ketidakjelasan tata kelola (Suwastoyo , 2024).

Secara teknis pelaksanaan, jangkauan program MBG ini sangat luas karena target pemerintah adalah memberikan makan bergizi gratis kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah perlu memetakan sekolah-sekolah mana yang lebih diutamakan dalam pelaksanaan program MBG. Misalnya, pemerintah dapat memprioritaskan sekolah-sekolah yang berada di daerah 3T daripada sekolah-sekolah yang berada di kabupaten dan kota-kota besar.

Beberapa kali Presiden dan Wakil Presiden telah melakukan kunjungan untuk memantau pelaksanaan program MBG, pada tanggal 20 Januari 2025 mengunjungi SMA Negeri 60 Jakarta (Wakil Presiden Republik Indonesia, 2025), 3 Februari 2025 mengunjungi sekolah SDN Jati 05 Pagi Pulogadung (Kementerian Sekretariat Negara, 2025), 4 Februari 2025 mengunjungi SMPN 11 and SMAN 4 Depok (Wakil Presiden Republik Indonesia, 2025), 10 Februari 2025 di mengunjungi SDN Kedung

Jaya 1 Bogor (Presiden Republik Indonesia, 2025). Beberapa kunjungan yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam meninjau pelaksanaan program MBG sering dilakukan di kota Jakarta. Melihat dari beberapa kunjungan yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam meninjau pelaksanaan MBG menunjukkan bahwa pemerintah berfokus pada daerah-daerah yang sudah maju. Seharusnya pemerintah sering meninjau pelaksanaan program MBG di daerah 3T agar pelaksanaan program MBG fokus kepada daerah tersebut. Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa karakteristik pada setiap sekolah dan siswanya sangat beragam khususnya daerah-daerah 3T membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah, oleh karena itu pemerintah tidak dapat menyamaratakan dalam menyikapi pelaksanaan program MBG di sekolah-sekolah. Dengan demikian maka program MBG dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai keadilan sosial sesuai dengan kebutuhan, adil, tepat sasaran dan dapat memberikan kesejahteraan.

### 3.2 Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Perspektif Dinamika Sosial - Politik

Cara memahami upaya mewujudkan cita-cita kesejahteraan sosial dalam ranah politik diperlukan diskursus untuk menjelaskan hal tersebut. Politik hadir dengan menegaskan bahwa negara merupakan aktor penting dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Seiring pada perkembangan zaman maka persoalan kesejahteraan sosial ini menjadi perhatian utama bagi pemerintah hal tersebut dapat dilihat dari isu-isu strategis seperti keterlibatan warga sipil dalam politik, etika politik, demokrasi dan ekonomi politik. Isu-isu kesejahteraan sosial merupakan tugas politik dalam menentukan suatu kebijakan atau program pemerintah. Negara Indonesia yang pluralistik sangat membutuhkan alat teoritis yang beragam terkait dengan perumusan kebijakan serta program pemerintah dalam kesejahteraan sosial dan politik (Pradana, 2020). Dapat dilihat bahwa program MBG merupakan salah satu upaya dalam memodernisasi sistem pendidikan melalui peningkatan kesejahteraan sosial di Indonesia. Hal tersebut dianggap sebagai adopsi kebijakan pemerintah yang terinspirasi dari beberapa negara maju lainnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial (Rahmawati, Prasetyo, & Ramdhani, 2024).

Dalam prakteknya memang sudah banyak negara-negara maju yang telah melaksanakan program makan siang gratis seperti di Amerika Serikat. *True Cost of Food: School Meals Case Study* menyebutkan bahwa program makan siang gratis bertujuan untuk meningkatkan kesehatan siswa dan dapat menumbuhkan ekonomi negara. Perkiraan sebanyak 30 juta siswa di Amerika telah mendapatkan manfaat dari pelaksanaan program ini, dengan biaya pertahun sekitar 18,7 miliar dolar AS. Program ini diklaim telah memberikan keuntungan di bidang kesehatan dan ekonomi (Septiani, Rosiana, & Azzahra, 2024).

Berdasarkan pada penjelasan paragraf di atas, dengan berkaca dari beberapa negara yang berhasil melaksanakan program makan siang gratis maka pemerintah perlu melakukan pendekatan dan perencanaan yang matang dalam membuat kebijakan pelaksanaan program MBG. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan

kesejahteraan yang merata dan dapat memprioritaskan daerah 3T dan daerah terpencil lainnya.

Terdapat beberapa pendekatan dalam proses perumusan kebijakan salah satunya adalah pendekatan rasionalitas. Pendekatan rasionalitas dipengaruhi oleh metode berpikir yang objektif dengan bertumpu pada rasionalitas berpikir ekonomis dan birokratis. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam proses perumusan kebijakan harus memperhitungkan dampak ekonomis yang akan ditimbulkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Sedangkan melihat dari perspektif rasionalitas birokrasi bertumpu kepada efisiensi dan efektifitas sebagai bagian dari implementasi kebijakan tersebut (Hill, 2025). Dengan demikian, dalam perumusan program MBG dengan anggaran yang sangat besar seharusnya dapat melihat lebih jauh bagaimana dampak ekonomi yang akan dihasilkan, sehingga kebijakan yang dibuat tidak akan mengganggu sektor lainnya.

Di Indonesia pendanaan program MBG menjadi perbincangan yang sangat ramai khususnya mengenai wacana penggunaan dana BOS yang ditolak oleh para pengajar. Adapun salah satu pernyataan tersebut berasal dari Airlangga Hartanto yang menyatakan bahwa alokasi dana BOS dapat dialihkan kepada program MBG. Adapun legitimasi dari pernyataan tersebut adalah karena kebijakan program MBG tersebut sangat bermanfaat bagi kesejahteraan para siswa. Dalam hal ini penggunaan dana BOS merupakan upaya strategis yang dilakukan memprioritaskan kesejahteraan para siswa. Hal ini merupakan bukti bahwa adanya praktik sosial yang terbingkai dalam struktur dominasi (Fasha & Tesniyadi, 2024).

Dana BOS merupakan dana Bantuan Operasional Sekolah sebagai sumber pendanaan dibidang pendidikan. Dana tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan mulai dari jenjang SD hingga SMA. Apabila dana ini digunakan untuk mendanai pelaksanaan MBG maka bagaimana cara pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Meskipun MBG merupakan program unggulan pemerintah, tidak seharusnya menggunakan dana BOS dalam pendanaannya, karena dana BOS dapat mengurangi putus sekolah, meringankan beban sekolah, dan meningkatkan kualitas pembelajaran.

Selain usulan di atas, muncul pula usulan lain dari Ketua DPD Sultan Bachtiar Najmudin agar pelaksanaan MBG dapat menggunakan dana zakat. Usulan tersebut juga memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Karena apabila menggunakan dana zakat maka esensi dari pelaksanaan makan gratis tidak dapat tercapai. Sementara pendapat lain menyatakan setuju dengan usulan ini dengan syarat bahwa MBG diperuntukkan hanya untuk fakir miskin. Di sisi lain Abdul Fikri Faqih anggota Komisi VIII DPR RI menilai bahwa MBG bisa menggunakan dana zakat dengan catatan harus sejalan dengan tujuan syariat zakat yaitu untuk kaum yang berhak menerima zakat (Ige, 2025).

Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, berpendapat bahwa wacana pelaksanaan MBG menggunakan dana zakat memperlihatkan bahwa tidak peka terhadap situasi dan kondisi negara dan pemerintahan yang baru. Dengan

demikian seharusnya usulan ini tidak ditindak lanjuti karena hal ini berhubungan dengan prinsip tata kelola keuangan negara yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. Dana zakat mempunyai tatakelola dalam penggunaannya yang diatur dalam syariat Islam sehingga jika dana tersebut dialihkan kepada program lain maka akan berpotensi memunculkan polemik baru di tengah masyarakat (Heriani, 2025). Melihat kompleksitas permasalahan dalam pelaksanaan MBG maka pemerintah perlu perancang secara terperinci tentang kendala dan tantangan yang akan dihadapi, sehingga pelaksanaan program MBG tidak mengganggu sektor lainnya. Seperti halnya dana BOS dan dana ZAKAT yang diusulkan untuk dijadikan sebagai pembiayaan MBG.

Meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, program MBG ini dianggap mempunyai banyak manfaat yaitu dapat mengurangi kelaparan, mencegah stunting, dan dapat menurunkan tingkat kekurangan gizi pada anak. Dalam program ini semua siswa berhak mendapatkan akses makan gizi gratis yang dapat meningkatkan inklusivitas dan kesetaraan pendidikan. Akan tetapi dibutuhkan dana yang sangat besar dalam pelaksanaan program ini, sehingga perlu pengelolaan yang transparan agar dana tersebut tidak disalahgunakan yang dapat menyebabkan kebocoran keuangan negara (Suwastoyo, 2024). Jika program MBG tidak terkonsep dengan baik dan terperinci, maka program ini dapat dijadikan sebagai ladang korupsi bagi para pejabat yang tidak bertanggung jawab. Tidak hanya itu, apabila dalam pelaksanaan program MBG tidak tepat sasaran, maka yang terjadi adalah pemerintah justru membantu siswa-siswa yang perekonomiannya menengah ke atas daripada siswa-siswa dengan tingkat perekonomiannya menengah ke bawah.

Pemerintah juga tidak dapat memaksakan pelaksanaan program MBG dengan mengalokasikan anggaran yang sangat besar. Hal tersebut dapat menyebabkan ketidakstabilan anggaran yang akan berimbas pada program kerja Kementerian / Lembaga. Khususnya penggunaan dana BOS dalam menunjang pelaksanaan MBG.

Tidak hanya dana BOS dan zakat, pemerintah juga memangkas anggaran pada banyak Kementerian dan Lembaga serta Pemda mengalami efisiensi anggaran berdasarkan pada Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang dialihkan salah satunya untuk pelaksanaan MBG. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden dalam pidatonya saat Kongres ke 18 Muslimat NU (Sekretariat Presiden, 2025).

Efisiensi anggaran Kementerian/ Lembaga dan Pemda yang dilakukan saat ini berlawanan dengan banyaknya jumlah Kementerian, Staf Ahli dan Staf Khusus dalam kabinet ini yang terdiri dari 48 menteri dan 5 pejabat yang tidak berada di bawah koordinasi oleh Kementerian Koordinator, serta 59 wakil menteri (Sekretariat Kabinet, 2024). Jika pemerintah melakukan efisiensi atau penghematan anggaran, tidak seharusnya jumlah Kementerian/ Lembaga menjadi semakin banyak seperti saat ini. Kementerian/ Lembaga yang semakin banyak akan berakibat pada pengeluaran negara yang lebih besar. Terlebih lagi pemerintahan saat ini mempunyai program unggulan MBG yang target pelaksanaannya untuk seluruh sekolah-sekolah di Indonesia.

Tujuan program MBG yang dilakukan pemerintah yaitu memberikan gizi cukup terhadap siswa berbanding terbalik dengan adanya efisiensi anggaran pendidikan pada Kementerian Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebanyak Rp 8,01 triliun. Efisiensi anggaran ini sangat menyulitkan dalam pelaksanaan program-program pendidikan. Problem sertifikasi guru, kesejahteraan bagi para guru, dan ketersediaan sekolah juga belum merata (Rachmawati, 2025). Selain itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Satrio Soemantri Brodjonegoro menyatakan bahwa efek dari efisiensi anggaran mengakibatkan banyak beasiswa pendidikan yang dihapuskan (CNN Indonesia, 2025) dan biaya kuliah yang semakin mahal (IDN Times, 2025). Pengalihan anggaran pada sektor lain untuk membiayai pelaksanaan MBG khususnya dalam bidang pendidikan merupakan bukti bahwa pemerintah tidak siap untuk melaksanakan program ini ke seluruh sekolah-sekolah di Indonesia.

Jika MBG bertujuan untuk memberikan makanan yang bergizi pada siswa maka seharusnya pemerintah berusaha untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka dengan memberikan kualitas pendidikan yang terbaik seperti tersedianya fasilitas bangunan sekolah yang layak, kesejahteraan bagi para guru maupun dosen, serta akses pendidikan yang murah dan mudah untuk para siswa maupun mahasiswa. Saat ini yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat adalah pendidikan gratis yang dapat memberikan dampak positif untuk masa depan bangsa dan negara.

Selain itu, pelaksanaan program MBG juga harus dapat melihat dari geografis dan segi sosial ekonomi. Dengan kondisi geografis yang berbeda-beda pada setiap daerah maka hal tersebut dapat mempengaruhi kebutuhan nutrisi pada setiap siswa, oleh karena itu maka pemerintah perlu menyesuaikan nutrisi apa saja yang akan diberikan. Jika dilihat secara sosial ekonomi, seharusnya program ini bekerjasama dengan UMKM, kantin atau tempat makan yang berada di lingkungan sekolah. Sehingga masyarakat di lingkungan tersebut semakin terbantu dan tidak kehilangan sumber penghasilan karena kehadiran program MBG. Dengan demikian maka program MBG dapat mendukung terlaksananya kesejahteraan dan keadilan sosial, bukan hanya sebagai program politik dari janji kampanye yang harus direalisasikan.

#### 4. Kesimpulan

Program MBG merupakan program unggulan pemerintah Presiden Prabowo yang membutuhkan anggaran sangat besar. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengkaji dengan sistematis dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah melalui screening terhadap sekolah-sekolah mana saja yang harus diutamakan dalam penerimaan program MBG. Oleh karena itu, penulis menyarankan bahwa pemerintah perlu memprioritaskan sekolah-sekolah yang berada di daerah 3T dan pulau-pulau kecil lainnya hal tersebut berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran karena dalam waktu yang sangat singkat tidak dimungkinkan melaksanakan program MBG secara merata ke seluruh Indonesia. Tidak hanya itu, pemerintah perlu melibatkan UMKM di lingkungan sekolah sebagai partner dalam pelaksanaan MBG. Sehingga masyarakat di lingkungan sekolah dapat merasakan manfaat atas pelaksanaan program MBG ini. Keberlanjutan program MBG

tidak sekadar bergantung pada faktor anggaran, tetapi juga pada stabilitas kebijakan serta komitmen lintas pemerintahan agar tidak menjadi program populis yang hanya bertahan dalam satu periode kepemimpinan.

## References

- Andin, A., Risti, D., Latifah, I., Panuntun, M., Nur, M., Selviani, R., & Saptatiningsih, R. I. (2025). "Penerapan Nilai Pancasila Melalui Program Makan Bergizi Gratis". *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research*, 3(1), 370-383. DOI: [10.57235/ijedr.v3i1.4684](https://doi.org/10.57235/ijedr.v3i1.4684)
- Asmaroini, A. P. (2017). "Menjaga Eksistensi Pancasila Dan Penerapannya Bagi Masyarakat Di Era Globalisasi". *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 50-64. DOI: [10.24269/v2.n1.2017.59-72](https://doi.org/10.24269/v2.n1.2017.59-72)
- Cisdi. (2024). "Makan Bergizi Gratis: Menilik Tujuan, Anggaran dan Tata Kelola Program". *Policy Paper Series: Mengkaji Ulang Program Makan Bergizi Gratis*. 1-16. Cisdi (Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives). <https://cdn.cisdi.org/documents/fnm-Policy-Paper-Makan-Bergizi-Gratis---Menilik-Tujuan-Anggaran-dan-Tata-Kelola-ProgramCISDIpdf-1723609579793-fnm.pdf>
- CNN Indonesia. (2025). "Pemotongan Anggaran Kemendikti, KIP Kuliah-Beasiswa Dosen Dipangkas". CNN Indonesia. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250212191509-20-1197614/pemotongan-anggaran-kemendikti-kip-kuliah-beasiswa-dosen-dipangkas> (Accessed, 7<sup>th</sup> February 2025)
- Fasha, S. S., & Tesniyadi, D. (2024). "Analisis Wacana Kritis Pada Artikel Tempo.co yang Berjudul "Dana BOS untuk Program Makan Siang Gratis"". *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(3),15077-15089. DOI: <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12362>
- Fauzi, R. A. (2024). Mengkritisi Kebijakan Populis: Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Dalam Lanskap Teori Perubahan Sosial *Academia.edu*. Retrieved Januari 24, 2025, from [https://www.academia.edu/122448223/MENGGKRITISI\\_KEBIJAKAN\\_POPULIS\\_MAKAN\\_SIANG\\_GRATIS\\_PRABOWO\\_GIBRAN\\_DALAM\\_LANSKAP\\_TEORI\\_PERUBAHAN\\_SOSIAL](https://www.academia.edu/122448223/MENGGKRITISI_KEBIJAKAN_POPULIS_MAKAN_SIANG_GRATIS_PRABOWO_GIBRAN_DALAM_LANSKAP_TEORI_PERUBAHAN_SOSIAL)
- Heriani, F. N. (Ed.). (2025). "Usulan Dana Zakat untuk Program Makan Bergizi Gratis Dinilai Tak Sesuai Aturan". Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/usulan-dana-zakat-untuk-program-makan-bergizi-gratis-dinilai-tak-sesuai-aturan-lt678e684579c74/> (Accessed, 7<sup>th</sup> February 2025)
- Hidayatullah, M. R. (2024). "Adik Prabowo Ungkap Asal-usul Ide Makan Bergizi Gratis, Tercetus Sejak 2006". (D. R. Meilanova, Ed.) *Bisnis.com*. Retrieved from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20241007/12/1805463/adik-prabowo-ungkap-asal-usul-ide-makan-bergizi-gratis-tercetus-sejak-2006> (Accessed, 7<sup>th</sup> February 2025)
- Hill, M. (2025). *The Public Policy Process* (Fourth ed.). Person Longman.
- IDN Times. (2025). "Mendikti Saintek: Jika Kena Efisiensi Biaya Kuliah Bisa Naik". Retrieved from <https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/mendikti-saintek-jika-kena-efisiensi-biaya-kuliah-bisa-naik?page=all> (Accessed, 7<sup>th</sup> February 2025)

- Ige, E. P. (Ed.). (2025). "Syarat Penggunaan Zakat Untuk Makan Bergizi Gratis". Retrieved from <https://www.liputan6.com/regional/read/5889756/syarat-penggunaan-zakat-untuk-makan-bergizi-gratis> (Accessed, 9<sup>th</sup> February 2025)
- Karger, H., & Stoesz, D. (2018). "American Social Welfare Policy: A Pluralist Approach" (8 ed.). New York: Pearson.
- Kementerian Sekretariat Negara. (2025). "Program Makan Bergizi Gratis, Harapan Baru untuk Anak Indonesia". Retrieved from [https://www.setneg.go.id/baca/index/program\\_makan\\_bergizi\\_gratis\\_harapan\\_baru\\_untuk\\_anak\\_indonesia](https://www.setneg.go.id/baca/index/program_makan_bergizi_gratis_harapan_baru_untuk_anak_indonesia) (Accessed, 9<sup>th</sup> February 2025)
- Kementerian Pertahanan. (2014). "45 butir Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila". <https://www.kemhan.go.id/renhan/2014/11/20/45-butir-pedoman-penghayatan-dan-pengamalan-pancasila.html> (Accessed, 7<sup>th</sup> February 2025)
- Kiftiyah, A., & Sutrisno, T. (2023). "Aligning Pancasila Values In The Regulation For Worship House Construction In Indonesia". *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 3(1), 47-56. DOI: <https://doi.org/10.52738/pjk.v3i1.136>
- Maharni, P. A., Namira, A. R., & Chairunnisa, T. V. (2024). "Peran Makan Siang Gratis Dalam Janji Kampanye Prabowo Gibran Dan Realisasinya". *Jolasos: Jurnal Of Law And Social Society*, 1(1), 1-10. DOI: <https://doi.org/10.70656/jolasos.v1i1.79>
- Merlinda, A. A., & Yusuf, Y. (2025). "Analisis Program Makan Gratis Prabowo Subianto Terhadap Strategi Peningkatan Motivasi Belajar Siswa di Sekolah Tinjauan dari Perspektif Sosiologi Pendidikan". *Ranah Research: Jurnal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 1364-1373. DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v7i2.1360>
- Pattipeilohy, L., & Saingo, Y. A. (2023). "Pancasila Sebagai Dasar Sistem Kesejahteraan Masyarakat Indonesia". *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(10), 355-365. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10137903>
- Pradana, R. A. (2020). "Sosial, Politik, Dan Ekonomi Kesejahteraan Sosial: Refleksi Demokrasi Dan Fenomena Sosial Indonesia". *Jurnal Universitas Pasundan*, 3(2), 87-101. Doi: [10.23969/paradigmapolistaat.v3i2.3717](https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v3i2.3717)
- Presiden Republik Indonesia. (2025). "Presiden Prabowo Tinjau Program MBG di Bogor, Tegaskan Komitmen untuk Anak Bangsa". Retrieved from <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-prabowo-tinjau-program-mbg-di-bogor-tegaskan-komitmen-untuk-anak-bangsa/> (Accessed, 9<sup>th</sup> February 2025)
- Rachmawati. (2025). "Anggaran Pendidikan Dipangkas Rp 8 Triliun, Bagaimana Nasib Guru Honorer dan Pembangunan Sekolah?" Kompas.com. Retrieved from <https://www.kompas.com/jawa-timur/read/2025/02/11/070800288/anggaran-pendidikan-dipangkas-rp-8-triliun-bagaimana-nasib-guru> (Accessed, 9<sup>th</sup> February 2025)
- Rahmawati, N. A., Prasetyo, S. A., & Ramdhani, M. W. (2024). "Memetakan Visi Prabowo Gibran Pada Masa Kampanye Dalam Prespektif Pembangunan:(Analisis Wacana Kritis Visi Dan Misi Prabowo Gibran Dalam Prespektif Modernisasi)". *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 97-120. DOI: <https://doi.org/10.62383/wissen.v2i3.176>
- Sari, R., & Najicha, F. U. (2022). "Memahami nilai-nilai pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan masyarakat". *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN*, 7(1), 53-58. doi: <https://doi.org/10.15294/harmony.v7i1.56445>
- Sekretariat Kabinet. (2024). "Presiden Prabowo Subianto Umumkan Susunan Kabinet Merah-Putih, di Istana Merdeka, Jakarta". Retrieved from [setkab.go.id](https://setkab.go.id/):

- <https://setkab.go.id/presiden-prabowo-subianto-umumkan-susunan-kabinet-merah-putih-di-istana-merdeka-jakarta/> (Accessed, 8<sup>th</sup> February 2025)
- Sekretariat Presiden. (2025). "LIVE: Presiden Prabowo Buka Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama, Surabaya, 10 Februari 2025". Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=a3CYMGFXLIk>
- Septiani, F. E., Rosiana, N., & Azzahra, A. (2024). "Dampak Makan Siang Gratis Pada Kondisi Keuangan Negara Dan Peningkatan Mutu Pendidikan". *JUPENSAL: Jurnal Pendidikan Universal*, 1(2), 191-196. Retrieved from <https://journalwbl.com/index.php/jupensal/issue/view/5>
- Suwastoyo, B. (2024). "Dilema Program Makan Siang Gratis, Antara Manfaat dan Tantangan". Retrieved from <https://www.cips-indonesia.org/post/dilema-program-makan-siang-gratis-antara-manfaat-dan-tantangan?lang=id> (Accessed, 8<sup>th</sup> February 2025)
- Suwastoyo, B. (2024). "CIPS (Center for Indonesian Policy Studies)". Retrieved Januari 24, 2025, from CIPS Indonesia: <https://www.cips-indonesia.org/post/dilema-program-makan-siang-gratis-antara-manfaat-dan-tantangan?lang=id> (Accessed, Januari 24, 2025)
- Tarmizi, S. N. (2024). "Peringatan HAN 2024 Jadi Momentum Lindungi Anak dari Stunting dan Polio". Retrieved from <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20240723/4346087/peringatan-han-2024-jadi-momentum-lindungi-anak-dari-stunting-dan-polio/> (Accessed, 8<sup>th</sup> February 2025)
- Triandini, E., & dkk. (2019). "Metode Systematic Literature Review untuk Identifikasi Platform dan Metode Pengembangan Sistem Informasi di Indonesia". *Indonesian Journal of Information Systems*, 1(2), 63-77. DOI: <https://doi.org/10.24002/ijis.v1i2.1916>
- Wakil Presiden Republik Indonesia. (2025). "Momen Wapres Tinjau Pelaksanaan MBG di SMA Negeri 60 Jakarta". Retrieved from <https://www.wapresri.go.id/momen-wapres-tinjau-pelaksanaan-mbg-di-sma-negeri-60-jakarta/> (Accessed, 11<sup>th</sup> February 2025)
- Wakil Presiden Republik Indonesia. (2025). "Pastikan Berjalan Lancar, Wapres Tinjau Program Makan Bergizi Gratis di Depok". Retrieved from <https://www.wapresri.go.id/pastikan-berjalan-lancar-wapres-tinjau-program-makan-bergizi-gratis-di-depok/> (Accessed, 11<sup>th</sup> February 2025)
- Yuanitasari, D., & Suparto, S. (2020). Peran Negara Dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila Untuk Mewujudkan kesejahteraan Sosial. *ACTA Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, 4(1), 36-51. doi: <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.327>